TIDAK ADA PERUBAHAN VOLUME DAN PERENCANAAN

Proyek Fisik Harus Tuntas 24 Desember 2020

YOGYA (KR) - Memasuki September beberapa proyek fisik milik Pemkot Yogya mulai digulirkan. Pekerjaan yang dibiayai dari dana pemerintah itu pun harus sudah bisa diselesaikan atau dituntaskan paling lambat pada 24 Desember 2020.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, menyebut ada perubahan kalender kerja yang ditetapkan pemerintah sebelumnya. "Cuti lebaran tahun ini kan digeser libur akhir tahun. Mulai 24 Desember sudah libur sampai tahun baru. Jika tidak ada perubahan, maka sebelum masa libur itu pekerjaan harus sudah selesai," jelasnya, Minggu (23/8).

Dengan begitu, durasi pekerjaan fisik hanya kurang dari empat bulan atau 110 hari kerja. Total ada empat jenis pekerjaan fisik yang diampu oleh DPUPKP Kota Yogya. Masing-masing penataan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman, revitalisasi kabel di kawasan Tugu, penataan trotoar di Jalan KH Ahmad Dahlan, dan pembangunan saluran air hujan di Jalan Kemasan Kotagede.

Umi mengatakan, meski waktu pekerjaan terbatas namun tidak ada perubahan volume maupun perencanaan. Teknis pekerjaan selama masa pandemi juga wajib menerapkan protokol sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Penerapan protokol itu juga tidak akan membebani pihak ketiga. Memang harus menambah anggaran namun tidak signifikan," tandasnya.

Dari keempat proyek fisik yang diampunya, pihaknya optimis bisa diselesaikan sesuai tata kala. Hanya, khusus penataan trotoar di Jalan KH Ahmad Dahlan sesuai perencanaan memang belum dituntaskan 100 persen. Pekerjaan di tahun ini hanya sampai penggantian lantai teraso seperti yang ada di kawasan Titik Nol Kilometer. Oleh karena itu fokus pekerjaan di sana ialah menyempurnakan utilitas di bawahnya, seperti penataan saluran limbah serta membuat *ducting* untuk serat kabel optik.

"Berkaca pada penataan di Jalan Jenderal Sudirman, kabel optik yang dulunya melintang di atas bisa dipindahkan ke dalam tanah. Kemudian untuk saluran limbah juga disempurnakan supaya kalau ada warga di sana yang hendak menyambung, tidak perlu membongkar trotoar," urainya.

Sedangkan untuk tamanisasi dan *street furniture*, akan dilanjutkan tahun depan. Pekerjaan di Jalan KH Ahmad Dahlan juga tidak akan menambah luasan trotoar karena lebarnya saat ini sudah sesuai. **(Dhi)-f**

Penting, Cetak Biru Pendidikan

YOGYA (KR) - Keinginan dari sejumlah pihak yang mendorong pemerintah untuk segera membuat cetak biru pendidikan, sebetulnya cukup bagus. Namun semua itu harus dilakukan dengan perencanaan matang dan melibatkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Sebab, cetak biru pendidikan adalah sebuah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

"Selama ini kita selalu mendengar ada sejumlah pihak yang meminta cetak biru (blueprint) pendidikan, sehingga kesan ganti menteri berganti kebijakan bisa diminimalisir. Karena rumusan cetak biru pendidikan merupakan hasil pemikiran para ahli pendidikan dari berbagai bidang. Seperti jenis pendidikan, proses dan media dalam pendidikan. Sampai para ahli memprediksi bagaimana pendidikan harus dilakukan pada masa kini untuk menjawab problematika bangsa di masa yang akan datang," kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Dr Ariswan MSi di Yogyakarta, Minggu (23/8).

Diungkapkan, cetak biru pendidikan dinilai penting, karena diharapkan bisa menjadikan arah kebijakan pendidikan menjadi lebih jelas. Dengan begitu pendidikan Indonesia tidak terkesan stagnan. Karena dalam cetak biru pendidikan sudah memuat kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi pencapaian, pelaksanaan program, sampai implementasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Oleh karena itu semua pasti sepakat dengan cetak biru pendidikan agar peta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional menjadi jelas. Sehingga dapat dirumuskan melalui rencana strategis Kemendikbud sebagai acuan untuk melakukan kebijakan yang telah dirumuskan. **(Ria)-f**

'PitPitPAN' Tebar Kemanfaatan

KR-Ardhi Wahdan

Heroe Poerwadi menyerahkan paket sembako.

YOGYA (KR) - Pada Minggu (23/8) tepat 22 tahun berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Momentum itu diperingati dengan cukup semarak oleh DPD PAN Kota Yogya namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Salah satu bentuk kegiatan berupa pembagian paket sembako, sekaligus untuk menebar kemanfaatan bagi masyarakat luas di tengah pandemi. "Semoga kehadiran PAN dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kondisi pandemi seperti saat ini dibutuhkan sikap kebersamaan, saling peduli dan disiplin. Optimis, kita akan mampu bangkit," tandas Ketua DPD PAN Kota Yogya Heroe Poerwadi, di sela peringatan HUT ke-22 tahun PAN, Minggu (23/8).

Total sedikitnya ada 500 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Selain pembagian sembako, semarak HUT kemarin juga diawali dengan bersepeda gembira berupa 'PitPitPAN' keliling kota. Sepeda gembira tersebut diikuti jajaran pengurus, kader maupun simpatisan. Sebagai puncaknya, jajaran pengurus melakukan Zoom Meeting bersama DPP dan kader se Indonesia selama dua jam mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Heroe berharap, baksos berupa pembagian paket sembako dapat terus digulirkan di tengah masyarakat. Terutama oleh kader dan pengurus manakala mendapati sesamanya yang tengah mengalami kesulitan. Hal itu pun sejalan dengan tema HUT PAN kali ini, yakni Bakti Nyata Untuk Indonesia. "Semua harus bergerak bersama. Kader PAN tentunya harus bisa menjadi penggerak di masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, semarak HUT PAN bagi DPD Kota Yogya tahun ini juga bermakna. Pasalnya seiring dengan itu berhasil diresmikan kantor baru DPD PAN Kota Yogya yang beralamat di Jalan Babaran 82 Warungboto Umbulharjo. **(Dhi)-f**

Hari Ini, Gubernur Resmikan Kantor OJK DIY

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, akan meresmikan gedung kantor OJK DIY di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Senin (24/8).

Keberadaan kantor OJK DIY ini diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengawal perekonomian di DIY khususnya Industri Jasa Keuangan (IJK) yang sehat dan lebih berperan dalam perlindungan konsumen.

"Pak Gubernur DIY dan Pak Ketua DK OJK yang akan meresmikan gedung kantor OJK DIY. Kami tidak banyak mengundang tamu dalam peresmian gedung yang terdiri diri dari lima lantai ini karena masa pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan diterapkan dengan ketat," ujar Kepala OJK DIY Jimmy Parjiman kepada KR di Yogyakarta, Minggu (23/8).

Keberadaan kantor OJK DIY yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi OJK DIY dengan meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi IJK.

"OJK DIY dituntut untuk meningkatkan layanan kepada IJK maupun masyarakat dengan kehadiran fasilitas ini lebih optimal," imbuhnya. **(Ira)-f**

"MULIA"
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19

- GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
  TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
  BUKA : 08.00 - 17.00 WIB
- PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
  TELP : 4331272
  BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
  BUKA SETIAP HARI : SENIN S/D MINGGU
- JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
  TELP : 0274 - 5015000
  BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL 22/AUG/2020

CURRENCY	BELI/ BN	BELI/ TC	JUAL
USD	14,675	-	14,975
EURO	17,375	-	17,675
AUD	10,550	-	10,800
GBP	19,250	-	19,750
CHF	16,150	-	16,500
SGD	10,675		10,975
JPY	138.00	-	143.00
MYR	3,425		3,625
SAR	3,675		3,975
YUAN	2,050		2,175

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

RAPERDA PEMBATASAN MULAI DISIAPKAN

Toko Jejaring Menjamur, Keberpihakan UMKM Dipertanyakan

YOGYA (KR) - Dalam dua tahun belakangan ini keberadaan toko jejaring di Kota Yogya semakin ramai bermunculan. Terutama setelah adanya kelonggaran izin usai Perwal 79/2010 terkait pembatasan usaha waralaba minimarket, dicabut dan diganti Perwal 56/2018.

Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Rifki Listianto SSi, menuturkan dalam Perwal 79/2010 diatur jumlah toko jejaring di tiap kecamatan berikut jalan protokol yang bisa dipergunakan.

"Sedangkan pada perwal yang baru yakni 56/2018, sudah tidak diatur mengenai jumlahnya yang beroperasi di Kota Yogya. Proses perizinannya pun menginduk pada sistem OSS," urainya.

Salah satu upaya penataan hanya diatur mengenai jarak minimal 400 meter dari pasar rakyat. Sedangkan semua tepi jalan dapat dipergunakan sebagai lokasi toko jejaring asalkan masuk dalam tata ruang daerah.

Dari sisi perizinan, pengelola di setiap wilayah hanya perlu mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Hal ini karena Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS sudah

KR-Ardhi Wahdan

Rifki Listianto SSi

dikantongi oleh pemilik hak dagang dan berlaku secara nasional. Apalagi IUTS berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan kepemilikan, nama usaha atau lokasi.

"Kontrol di wilayah hanya pada syarat kajian sosial dan ekonomi. Itu pun atas rekomendasi dari Disperindag. Makanya kami minta Disperindag benar-benar selektif, teliti dan objektif dalam verifikasi," tandas Rifki yang duduk di Komisi B ini.

Menurut Rifki, menjamurnya toko modern satu sisi menjadi dilema antara pertumbuhan investasi di Kota Yogya dengan keberpihakan pedagang kecil seperti warung kelontong di kampung maupun pelaku UMKM. Akan tetapi hal itu sebenarnya terletak pada sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM atau toko kelontong. Terlebih lagi permasalahan di lapangan yang kerap ditemui ialah banyak toko jejaring yang belum memiliki perizinan lengkap namun sudah beroperasi. Jika tidak ada tindakan tegas dari Pemkot, maka hal itu terkesan menjadi pembiaran.

Tupoksi untuk melakukan penertiban juga jadi persoalan karena belum ada perda yang khusus mengatur hal tersebut. Payung hukum hanya berupa perwal sementara ketugasan Sat Pol PP ialah mengawal perda. Oleh karena itu, salah satu solusinya jajaran Komisi B sedang menyusun raperda inisiatif terkait pengaturan toko jejaring. Dengan begitu keberpihakan terhadap pelaku UMKM dapat direalisasikan. "Investasi memang harus tumbuh namun jangan sampai mengabaikan industri UMKM," tandas Rifki. **(Dhi)-f**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

إنا لله وإنا إليه راجعون

Yayasan Badan Wakaf (YBW) dan keluarga besar Universitas Islam Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Meninggal dunia di Yogyakarta pada 22 Agustus 2020
Usia: 57 tahun

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UII periode 1995-1998
Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII periode 2006-2009 dan 2014-2018
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UII periode 2018-2019

Semoga Almarhum mendapat akhir terbaik, husnul khatimah, dan diterima segala amal ibadahnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Swt.

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Drs. Suwarsono Muhammad, M.A.
Ketua Umum Pengurus YBW UII

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Rektor

uii.ac.id